

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta berada di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis ini membuat Indonesia menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Indonesia juga ber iklim tropis yang memiliki 2 musim yaitu musim panas dan musim hujan hingga mengakibatkan perubahan cuaca, arah angin, dan suhu yang sangat ekstrem. Dampak positif dari iklim tropis yang dialami Indonesia meliputi kekayaan flora dan fauna, serta berbagai sumber daya alam yang melimpah. Namun, dampak negatif dari iklim tropis ini menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi yang dapat mencakup antara lain banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan kekeringan. Bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, masalah kesehatan dan gangguan sosial lainnya (Pramono & Yusuf, 2020).

Banjir sudah menjadi kejadian biasa setiap tahunnya di Provinsi Aceh Indonesia. Banjir menimbulkan masalah serius di wilayah tersebut, yang berdampak pada kehidupan warga dan warga infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, penyelidikan ini dimaksudkan untuk menganalisis efektivitas system penanggulangan banjir di kabupaten Aceh untuk mengevaluasi Sistem pengelolaan banjir ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mitigasi bencana banjir (Rahman et al., 2024).

Sebagai wilayah yang sering dilanda banjir maka harus adanya perlindungan kepada masyarakat dari pemerintah daerah setempat, seturama dalam hal

kebencanaan banjir sehingga dibentuk BPBD yang berada dibawah naungan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Provinsi aceh adalah satu daerah yang intensitas kejadian bencana banjir cukup tinggi. Banjir di provinsi aceh disebabkan beberapa faktor kejadian alam seperti tingginya intensitas hujan dan gelombang pasang air laut seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi terus menerus selama beberapa hari di wilayah Kabupaten Aceh, Provinsi Aceh menyebabkan Sungai Tamiang meluap dan memicu banjir pada Rabu, 05 Oktober 2022. Luapan air sungai mulai menggenang sejak pukul 09.00 WIB hingga ketinggian 80 sentimeter. Terdapat empat kecamatan yang terdampak banjir antara lain Kecamatan Bandar Pusaka tepatnya Gampong Pantai Cempaka dan Babo. Kemudian Kecamatan Sekerak tepatnya Gampong Baleng Karang dan Juar, Kecamatan Kota Kualasimpang tepatnya Gampong Kualasimpang, dan terakhir Kecamatan Kejuruan Muda di Gampong Bukit Rata. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang telah berada di lokasi banjir untuk melakukan pendataan korban dan kerusakan. Berdasarkan laporan petugas di lapangan, banjir menyebabkan terputusnya akses jalan dari Gampong Juar menuju Gampong Sekumur yang terletak di Kecamatan Sekerak. Sementara itu, melalui kajian InaRiski wilayah Aceh Tamiang memiliki risiko bahaya sedang hingga tinggi pada 12 kecamatan dengan luas bahaya seluas 70.722 hektar.

(Sumber;<https://bnpb.go.id/berita/banjir-hingga-80-sentimeter-akses-jalan-di-aceh-tamiang-terputus> di akses pada tanggal 09 April 2023).

Berdasarkan data yang dihimpun, banjir Aceh Tamiang itu melanda 146 Desa di seluruh Kecamatan, usai daerah itu diguyur hujan sejak Minggu

(30/10/2022) lalu. Imbasnya air sungai meluap ke permukiman penduduk dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Sedikitnya 11 ribu lebih keluarga mengungsi di 267 titik pengungsian. Sehingga menyebabkan banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang hampir sepekan terjadi. Hingga Sabtu (5/11) siang, banjir belum juga surut. Akses transportasi di jalan lintas nasional Banda Aceh-Medan masih lumpuh. Pemerintah setempat menyebut ada sekitar 79 desa terisolir. Suplai bantuan untuk korban banjir tak bisa dibawa pakai kendaraan mobil ataupun perahu karet lantaran Desa yang terisolir itu ada di hulu.

Kemudian melihat terjadinya banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, ada 12 Kecamatan yang terendam banjir yaitu Kecamatan Sekerak, Kota Kualasimpang, Tenggulun, Tamiang Hulu, Bendahara, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Seruway, Karang Baru, Mayak Payed, Rantau dan Kecamatan Banda Mulia harus di lihat dari pada banyak faktor karena bukan hanya sebatas akibat intensitas hujan yang tinggi, kemungkinan akan ada faktor lain yang bisa mengakibatkan banjir, karena jika melihat daerah aliran sungai di Aceh Tamiang, sungai-sungai tersebut sudah mengalami kerusakan yang cukup parah karena tidak ada lagi pepohonan yang dapat menormalisasikan daerah aliran sungai, sehingga daerah aliran sungai udah tergerus dan longsor karena sudah di kelilingi oleh pohon sawit dan sebagian sudah tidak ada lagi pohon-pohon yang berguna untuk menyanggah supaya tidak terjadinya longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang masih terus mendata dampak kerugian yang ditimbulkan akibat banjir di Kabupaten ujung timur Aceh ini yang berlangsung lebih dari sepekan. Pada tanggal 23 November 2022 data laporan yang masuk baru dari delapan kecamatan, sementara empat

kecamatan lagi sedang menyusul. Kalau untuk 12 kecamatan (Se-Aceh Tamiang) kerugian akibat banjir dengan nilai mendekati Rp200 miliar,” kata kepala pelaksanaan BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery di Aceh Tamiang. Bencana banjir di Aceh Tamiang menyebabkan kerusakan dan kerugian di berbagai sektor terutama di sektor perumahan dan infrastruktur yang paling parah dan sektor lainnya ujar kata kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Abdul Hanan mengatakan, selain karena deforestasi, rawa-rawa sebagai kantong penampung air telah bersalin menjadi perumahan. Padahal, rawa-rawa tersebut dapat menampung air hujan sebelum mengalir ke sungai. Bicara Pemkab Aceh Tamiang Agusliana Devita menuturkan, mitigasi harus dilakukan agar risiko banjir dapat ditekan. Mitigasi dapat dilakukan dengan memulihkan kawasan hutan, menormalisasi sungai, membangun tanggul, membuat kantong penampung air, hingga penyesuaian bentuk rumah warga yang berada di zona rawan *Sumber; (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/19/banjir-berulang-di-aceh-tamiang> di akses pada tanggal 09 april 2023)*

Upaya pemerintah daerah kabupaten aceh tamiang menangani bencana melalui BPBD kabupaten aceh tamiang salah satunya dengan strategi mitigasi bencana banjir seperti membangun kerja sama yang baik, pengoordinasian dan komunikasi dalam penanganan banjir, Masyarakat dan pemerintah daerah setempat dapat menerapkan langkah kesiapsiagaan dan pencegahan dengan melakukan susur sungai secara berkala bersama tenaga profesional, membuat tempat penampungan air sementara atau tanggul penahan air, memantau debit air

dan bersiap-siap jika curah hujan tinggi selama lebih dari satu jam serta membuat rencana evakuasi khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai.

Namun permasalahan banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang di beberapa tahun terakhir harus menjadi perhatian seluruh *stake holder* agar dapat membuat sebuah keputusan maupun kebijakan yang komprehensif agar situasi banjir tidak menjadi bencana tahunan yang membuat masyarakat mengalami penderitaan yang buruk. Maka dari itu inovasi pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah harus memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat.

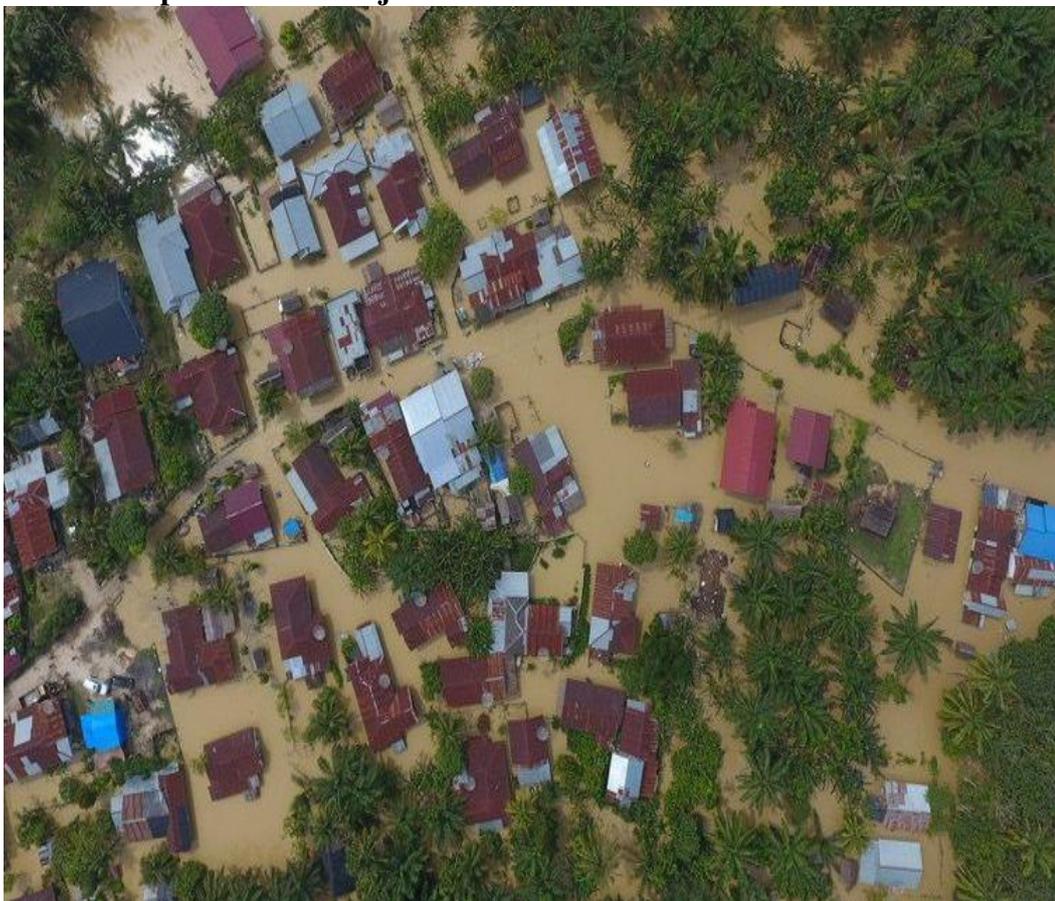
Gambar 1.1
Peta Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang



Berdasarkan gambar diatas terlihat beberapa titik di Provisis Aceh

tergenang banjir, terlebih lagi daerah Aceh Tamiang terlihat bahwa di beberapa Kecamatan di Aceh Tamiang tergenang banjir yang cukup parah, dimana masyarakat diharuskan untuk mengungsi, lebih kurang ada 12 Kecamatan yang digenangi oleh banjir dan dalam situasi yang harus tetap waspada karena bahaya banjir susulan.

Gambar 1.2
Tampilan udara banjir di Desa Alur Manis Kecamatan Rantau



Sumber ;(Kompas.Tv/Zikri, 6/11/2022)

Dari observasi penulis terhadap banjir yang melanda Aceh Tamiang tentu harus adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Aceh Tamiang yakni Bupati terhadap bagaimana pelayanan yang diharapkan masyarakat agar tidak terjadinya banjir jika intensitas curah hujan yang tinggi. Jangan sampai akibat

banjir yang melanda Aceh Tamiang menjadi alasan bagi pemerintah dalam mewujudkan proses pembangunan terhadap penanggulangan banjir dan seharusnya banjir bisa di tanggulangi. Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022?
2. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus kajian penelitian ini,sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022.
2. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian penelitian penulis maka tujuan penulisan penelitian ini,sebagai berikut:

1. Agar mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam

penanggulangan Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tahun 2022.

2. Agar mengetahui apa saja faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan dari penulisan proposal ini maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan masukan yang dapat dari sumber informasi bagi disiplinnya ilmu Politik, terutama pada bidang Penanggulangan Banjir.
2. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan banjir.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara lain:

1. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan elit politik mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan banjir.
2. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pembaca, pengamat politik, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan banjir.